**URGENSI PENGATURAN BENTUK PERJANJIAN TERTULIS ANTARA
BIRO PENYELENGGARA UMRAH DENGAN JEMAAH UMRAH***THE URGENCY OF ARRANGING THE FORM OF A WRITTEN AGREEMENT
BETWEEN THE UMRAH ORGANIZING BUREAU AND THE UMRAH CONGREGATION***Aufa Fajrul Hikmah*, Nur Chanifah, Hanif Nur Widhiyanti**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 09 Juni 2023

Disetujui : 08 September 2023

Keywords:umrah travel bureau, umrah pilgrimage,
umrah agreement.**Kata Kunci:**biro perjalanan ibadah umrah; ibadah
umrah; perjanjian umrah.***) Korespondensi:**E-mail: aufa_hikmah@gmail.com

Abstract: the purpose of writing this article is to discuss the urgency of arranging a written Umrah departure agreement. The study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. Law Number 18 of 2019 concerning the Implementation of the Hajj and Umrah Pilgrimage does not require written agreements so that problems often arise that are detrimental to the congregation. Collaboration between the bureau and the umrah congregation can run smoothly if the agreement is implemented in writing. This is to reduce the risk of fraud or other things that could harm one or both parties. A written agreement provides more legal certainty and protection to the parties which is used as a guide for the bureau and the congregation to act in accordance with what was promised.

Abstrak: tujuan penulisan artikel untuk membahas urgensi pengaturan bentuk perjanjian pemberangkatan ibadah umrah secara tertulis. Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak mewajibkan perjanjian secara tertulis sehingga seringkali muncul permasalahan yang merugikan jemaah. Kerjasama antara biro dengan jemaah umrah dapat berjalan dengan lancar apabila perjanjian dilaksanakan secara tertulis. Hal ini untuk mengurangi risiko adanya penipuan atau hal lainnya yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak yang digunakan sebagai pedoman bagi biro maupun jemaah untuk bertindak sesuai dengan yang dijanjikan.

PENDAHULUAN

Ibadah umroh adalah mengunjungi kota Makkah untuk melakukan ibadah (niat umroh, thawaf dan sa'i) dengan tata cara tertentu. Umrah atau yang sering disebut sebagai haji kecil merupakan ibadah yang syarat dan ketentuan pelaksanaannya mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina dan melempar Jumrah. Ibadah umrah yang merupakan sunnah dapat dilakukan di bulan selain bulan Dzulhijjah (Noor, 2018). Rukun umroh berbeda dengan rukun haji, waktu pelaksanaan juga berbeda karena umrah dapat dilakukan kapan saja

(Ruswandana, 2016). Umrah lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan berulang kali dalam satu tahun.

Ibadah umroh diselenggarakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau disingkat PPIU. PPIU merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah (Kusumah dan Januarita, 2018). Rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umroh dilakukan di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, dan dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan umrah

adalah penyelenggara, jemaah, dan pemerintah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Jemaah umroh adalah setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umroh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah dalam peraturan pemerintah meliputi Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggara Ibadah Umroh, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Pemberian pelayanan biro perjalanan didasari dengan berbagai persyaratan dan kesepakatan antara calon jemaah dengan pihak biro perjalanan. Biro umrah merupakan badan usaha atau lembaga yang menyediakan layanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberangkatan calon jemaah umroh serta segala hal yang berhubungan dengan pemberangkatan umroh (Amanz, 2015). Pelayanan biro perjalanan yang baik akan memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi calon jemaah umrah (Maharani, 2020). Seseorang yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah harus mendaftar dan mengurus administrasi dan keperluannya di biro perjalanan umroh.

Penyelenggaraan serta pengelolaan dilakukan langsung oleh negara. Undang-Undang menyerahkan pelaksanaan ibadah haji khusus dan ibadah umrah pada pihak swasta yakni biro perjalanan. Perusahaan yang menyediakan jasa travel umrah dan haji yang dijadikan sebuah peluang bisnis yang menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk menarik jemaah (Istiawati, 2023). Perkembangan biro penyelenggara umrah yang meningkat secara signifikan setiap tahun. Peluang bisnis yang terdapat dalam biro perjalanan umrah dan haji khusus perlu ada jaminan keamanan dan perlindungan bagi calon jemaah yang akan memilih biro perjalanan. Haji khusus serta umrah diselenggarakan oleh swasta yang segala sesuatu tentang hak dan kewajiban disepakati sendiri oleh biro perjalanan dengan calon jemaah.

Tumbuhnya usaha penyelenggaraan umrah dan haji plus tidak seiring dengan ketersediaan SDM profesional baik dalam proses memberi bimbingan maupun manajerial pengelolaan usaha. Masalah dalam penyelenggaraan umrah tidak hanya disebabkan oleh faktor SDM saja, tetapi juga persaingan usaha di antara penyelenggara

umrah yang juga memicu permasalahan lain seperti harga perjalanan yang dibuat sangat murah untuk memikat jemaah (Hidayat, 2022). Harga yang sangat murah bahkan jauh di bawah standar berdampak pada buruknya layanan yang diberikan kepada jemaah (Dani, 2018). Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah oleh biro perjalanan swasta cukup marak terjadi di masyarakat.

Kendala dan masalah dalam perjanjian ibadah umrah antara calon jemaah dengan biro perjalanan adalah tidak dicantumkannya hak dan kewajiban calon jemaah umrah dalam bentuk kontrak perjanjian tertulis secara rinci yang ditandatangani kedua belah pihak. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan ibadah umrah yaitu adanya berbagai praktik penipuan atau manipulasi oleh calo atau agen serta calo tiket dan visa yang mengakibatkan tidak menerima tiket atau visa sesuai jadwal yang telah ditentukan dan menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan keberangkatan jemaah umrah (Trisnawati, 2019). Pihak penyelenggara pada beberapa kasus tidak memberikan pelayanan umroh sesuai dengan yang dijanjikan.

Permasalahan yang terjadi dalam perjalanan umroh yang melibatkan pihak travel cukup banyak dan menimbulkan berbagai kerugian, khususnya pada para jemaah. Kasus yang telah terjadi meliputi jemaah tidak mendapatkan Nomor Porsi Umrah (NPU), pemberangkatan terlambat, penelantaran jemaah, tidak ada pengembalian biaya pemberangkatan Ibadah Umrah (BPIU) setelah pembatalan keberangkatan, kegagalan keberangkatan, tidak diberikan bimbingan atau manasik, tidak ada asuransi perjalanan, pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan minimal (SPM), jemaah tidak dipulangkan, dan masalah lainnya. Hal ini karena kepercayaan calon jemaah umrah pada penyelenggara umrah yang tinggi. Namun, perusahaan tidak bertanggung jawab penyelenggaraan ibadah, dan tidak ada bukti otentik perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis antara biro perjalanan umrah dengan calon jemaah umrah.

Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak mencantumkan kewajiban membuat perjanjian umrah secara tertulis antara pihak penyelenggara dengan jemaah. Bentuk perjanjian tertulis dalam Pasal 88 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mencantumkan kewajiban pemberian layanan lainnya sesuai perjanjian tertulis. Terdapat ketidaklengkapan dalam Undang-Undang tentang Haji dan Umrah yang telah menyebutkan bahwa pelayanan biro harus sesuai perjanjian tertulis, namun tidak ada pasal yang mewajibkan perjanjian antara biro dengan jemaah dituangkan dalam bentuk tertulis.

Bentuk perjanjian secara tertulis yang tidak diwajibkan menyebabkan banyak biro yang tidak membuat perjanjian tertulis dan berakibat pada timbulnya permasalahan. Biro perjalanan umrah banyak yang tidak memberangkatkan calon jemaahnya atau memberi fasilitas dan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada calon jemaah. Calon jemaah juga sulit untuk menuntut haknya karena tidak memiliki perjanjian tertulis sebagai bukti otentik yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka penulisan ini bertujuan membahas urgensi pengaturan bentuk perjanjian pemberangkatan umrah secara tertulis.

METODE

Kajian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar untuk penajaman analisis yang dilakukan (Soekanto dan Mamudji, 2018). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan penelusuran isi atau makna aturan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Bentuk Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Umrah Secara Tertulis

Ibadah umrah merupakan berkunjung ke baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. Penyelenggaraan ibadah umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Keputusan Direktur

Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 337 tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Penyelenggaraan ibadah umrah dalam Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur dalam BAB VII yang pada pasal 86 menyebutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan oleh perseorangan atau berkelompok melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, selain itu ibadah umrah dapat diselenggarakan oleh pemerintah jika terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat yang ditetapkan oleh presiden. Penyelenggaraan Ibadah Umrah berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan yang ditunjuk dengan keputusan Menteri. Penyelenggara umrah adalah biro perjalanan yang telah diberi kewenangan oleh Menteri untuk menyelenggarakan umrah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan biro perjalanan yang umumnya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Biro perjalanan wisata atau perjalanan agen disebut juga agen perniagaan (*commercial agent*). Kementerian Agama selaku pelaksana serta penanggung jawab ibadah haji dan umrah turut mengawasi banyaknya biro perjalanan umrah yang ada di kota atau kabupaten masing-masing. Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah pihak biro perjalanan yang menyediakan layanan umrah harus memenuhi syarat menyelenggarakan ibadah umrah yang telah tertuang dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berbunyi dalam Pasal 86, yaitu perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok melalui PPIU dan penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah dilakukan oleh PPIU.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Nomor 337 tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, PPIU merupakan biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan ibadah umrah. Biro perjalanan harus melewati rangkaian sertifikasi yang dilakukan

oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Ibadah Umrah (LS PPIU) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk dapat menjadi PPIU. Sertifikasi PPIU merupakan proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat bahwa PPIU telah dievaluasi dan dinyatakan memenuhi kriteria. Kegiatan sertifikasi PPIU dilakukan mencakup evaluasi yang dilakukan pemenuhan: (a) izin operasional, (b) jaminan keuangan, (c) perubahan *share older* (jika ada), (d) kepemilikan kantor cabang (jika ada), (e) struktur biaya, (f) proses pendaftaran dan pembatalan jemaah, (g) aspek pelayanan, dan (h) penanganan pengaduan jemaah.

Syarat PPIU diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan/atau Pemerintah. Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Hal ini berhubungan dengan Pasal 3 yaitu PPIU yang dapat penyelenggara harus mendapatkan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin menjadi PPIU sebagaimana diatur pada Pasal 89 Undang Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu PPIU biro perjalanan wisata agar mendapatkan perizinan berusaha harus dimiliki dan dikelola oleh WNI yang beragama islam serta memenuhi persyaratan sesuai dengan standar, norma, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketentuan yang berisi standar, norma, prosedur, dan kriteria yang telah disebutkan pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021.

Syarat izin operasional sebuah biro perjalanan wisata menjadi PPIU dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 167 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Izin Operasional

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Secara Elektronik melalui tahapan: penerbitan surat rekomendasi, pendaftaran, penginputan dokumen persyaratan, verifikasi dan validasi dokumen, serta. pengajuan permohonan penerbitan izin. Dengan adanya Undang- Undang Nomor 11 tahun 20120 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah, Biro perjalanan semakin diberikan kemudahan dalam mendapatkan izin sebagai PPIU. Kemudahan mendapatkan izin PPIU diatur dalam Pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Badan Perjalanan Wisata (BPW) yang sudah beroperasi minimal satu tahun bisa mengajukan izin PPIU, berbeda dengan peraturan sebelumnya, persyaratan minimum adalah dua tahun. Mendapatkan persetujuan juga lebih mudah yaitu secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kemudahan perizinan terhadap biro tersebut tidak disertai dengan peraturan yang menjamin kesesuaian pelayanan dari biro perjalanan umrah kepada calon jemaah umrah seperti yang telah ditawarkan atau dijanjikan oleh biro perjalanan umrah.

Kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah merupakan hak bagi pihak pihak lain atau jemaah. Hak jemaah umrah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 88 adalah memperoleh lima layanan dari PPIU yaitu: bimbingan ibadah umrah, layanan kesehatan, kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi, layanan lainnya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah, dan melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah kepada Menteri. Hak dari jemaah umrah harus dipenuhi atau telah menjadi kewajiban biro perjalanan yang harus dilaksanakan.

Kewajiban yang dibebankan kepada PPIU diatur dalam Pasal 94 Undang- Undang Nomor 8 tahun 2019 yaitu: (a) menyediakan paling sedikit satu orang pembimbing ibadah setiap 45 orang jemaah umrah, (b) memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah, (c) memiliki perjanjian kerja

sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi, (d) memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi, (e) menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada Menteri secara tertulis sebelum keberangkatan, (f) melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia, (g) membuat laporan kepada Menteri paling lambat 10 hari setelah tiba kembali di tanah air, (h) memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan, (i) mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi, dan (j) mengikuti prinsip syariat. Kewajiban tersebut menunjukkan perlindungan hukum terhadap calon jemaah umrah karena sudah melaksanakan kewajibannya membayar sejumlah biaya.

Pengaturan mengenai larangan PPIU terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyebutkan PPIU dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran, atau kegagalan kepulangan jemaah umrah. Sanksi pihak penyelenggara ibadah umrah juga tercantum dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 yaitu setiap orang yang tanpa hak bertindak sebagai PPIU dengan mengumpulkan dan/atau memberangkatkan jemaah umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Pasal 88 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan kewajiban memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan Perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah. Pasal 94 angka 2 juga menyebutkan memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU dan jemaah umrah. Biro perjalanan umrah diwajibkan untuk memberi pelayanan sesuai dengan perjanjian tertulis antara biro dan calon jemaah mengacu dalam Pasal 88 huruf d.

Perjanjian tertulis adalah hal yang penting dan seharusnya dibuat oleh para pihak agar kewajiban pelayanan oleh biro ini dapat

dilaksanakan. Namun masih banyak biro perjalanan umrah yang tidak membuat perjanjian tertulis dengan calon jemaah sehingga apabila hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi, tidak ada bukti otentik untuk menuntut hak dari calon jemaah kepada biro perjalanan umrah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biro perjalanan umrah hanya memberikan sebuah formulir data diri yang harus diisi oleh calon jemaah, dan di dalamnya tidak tercantum tentang hak dan kewajiban.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perjanjian mengatur bahwa setiap perjanjian sah dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Perjanjian secara lisan pun dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dengan tidak dituangkannya perjanjian umrah dalam bentuk tertulis, calon jemaah umrah menjadi tidak mendapat kepastian mengenai hak dan kewajibannya serta hak dan kewajiban dari biro perjalanan umrah. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian sangat penting bagi calon jemaah umrah maupun biro perjalanan selaku PPIU karena dalam perjanjian tertulis itulah diuraikan segala objek perjanjian, hak dan kewajiban bagi calon jemaah umrah maupun biro perjalanan umrah.

Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian yang dibuat oleh calon jemaah dan biro, tidak tercantum adanya kewajiban bentuk perjanjian umrah secara tertulis. Perjanjian tertulis banyak yang tidak dilaksanakan karena dari pasal 88 huruf d serta Pasal 94 angka 2 tidak dapat dimaknai bahwa Undang-Undang mewajibkan biro dan jemaah membuat perjanjian tertulis. Kelemahan dalam Undang-Undang tentang Haji dan Umrah menyebutkan bahwa pelayanan biro harus sesuai perjanjian tertulis, namun tidak ada pasal yang mewajibkan perjanjian antara biro dengan jemaah dituangkan dalam bentuk tertulis.

Bentuk perjanjian tertulis yang tidak diwajibkan menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, banyak kasus biro perjalanan umrah yang tidak memberangkatkan calon jemaahnya, atau memberi fasilitas dan pelayanan yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada calon jemaah. Namun calon jemaah pun sulit untuk menuntut haknya karena tidak memiliki perjanjian tertulis sebagai bukti otentik yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing

pihak.

Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengatur berbagai hal mengenai segala yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Perizinan suatu biro perjalanan menjadi PPIU, pengawasan terhadap PPIU, hak dan kewajiban dari calon jemaah maupun PPIU mulai administrasi sebelum pemberangkatan hingga kepulangan jemaah umrah ke tanah air. Pengawasan oleh pemerintah khususnya Kementerian Agama terhadap penyelenggara umrah sangat penting untuk melindungi para jemaah dari berbagai penipuan dan lainnya (Fauzi, 2019). Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa bentuk perjanjian bukanlah termasuk dari syarat sahnya suatu perjanjian, namun bentuk perjanjian tertulis sangat penting bagi penyelenggaraan ibadah umrah. Hal ini karena adanya perbedaan posisi, perbedaan pengetahuan antara calon jemaah umrah dengan biro yang membuat calon jemaah sangat perlu mengetahui secara jelas hak-haknya yang akan didapat.

Perjanjian merupakan salah satu asal perikatan, dengan membuat suatu perjanjian maka para pihak dalam perjanjian berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjikan. Perjanjian sebagai sumber perjanjian dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Pihak yang berhak menuntut sesuatu itu dinamakan kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur (Setiawan, 2015). Perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, pihak yang satu berhak menuntut suatu hal yang dari pihak yang lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum dapat terjadi antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yakni orang dengan orang, orang dengan badan hukum dan sebaliknya, serta badan hukum dengan badan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak dan hak dan kewajiban di pihak lain (Soeroso, 2006). Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi secara kontinu atau berkesinambungan. Antara konsumen dan

pelaku usaha sama-sama saling membutuhkan untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Konsumen membutuhkan barang atau jasa dari pelaku usaha untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi, sementara itu pelaku usaha membutuhkan keuntungan dan upah berupa pembayaran dari konsumen.

Hubungan hukum yang terjadi antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah adalah hubungan konsumen dengan pelaku usaha yang terikat dengan perjanjian pelayanan jasa. Hubungan tersebut terjadi terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan terjadi karena keduanya saling menghendaki serta ada tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lainnya. Biro perjalanan umrah selaku pelaku usaha yang menawarkan jasanya dan calon jemaah umrah selaku konsumen yang memanfaatkan jasa dari biro perjalanan umrah tersebut.

Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah menyerahkan semuanya kepada penyedia jasa perjalanan umrah. Konsumen sering kali disarankan untuk memilih paket umrah yang ditawarkan oleh biro perjalanan umrah, jika konsumen sudah memilih paket umrah yang diinginkan maka konsumen akan membayar. Pembayaran merupakan bentuk kesepakatan antara biro perjalanan haji umrah dengan konsumen. Hubungan hukum antara biro perjalanan umrah dengan jemaah umrah adalah hubungan hukum antara badan usaha dengan konsumen. Penyedia jasa yaitu biro umrah sebagai agen komersial telah mengadakan perjanjian dengan konsumen (jemaah sebagai konsumen) dan bertanggung jawab untuk memastikan diakui secara hukum adanya perjanjian penggunaan jasa antara kedua belah pihak.

Kegiatan penyelenggaraan ibadah umrah antara penyelenggara perjalanan wisata dengan konsumen memiliki hubungan hukum yang menimbulkan tanggung jawab, hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga timbul suatu kesepakatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berada dalam lingkup harta kekayaan yang menjadi hak satu pihak dan pihak lain wajib melakukan pemenuhan. perikatan menimbulkan kewajiban bagi para pihak dalam hubungan hukum. Perikatan berlandaskan pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang mengatur bahwa perikatan dilahirkan dari perjanjian atau karena

karena undang-undang. Perikatan yang timbul dari perjanjian mempunyai akibat hukum berdasarkan perjanjian itu.

Terjadinya suatu pengalihan barang biasanya diawali dengan perjanjian yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen secara langsung merupakan hubungan yang terjadi karena pelaku usaha dengan konsumen terikat secara langsung dalam perjanjian (Muru dan Yodo, 2004). Perjanjian mengenai jual beli dituangkan dalam pasal 1457 KUHPerdara yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain membayar seharga yang telah diperjanjikan.

Tanggung jawab yang muncul dari perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*). Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar kontrak dari pelaku usaha baik yang menawarkan jasa maupun barang atas kerugian yang ditimbulkan akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa yang ditawarkan. Perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha hampir mayoritas menggunakan bentuk kontrak baku (Rusli, 2012). Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi Ketika pelaku usaha memberi informasi dan janji mengenai produk barang atau jasa, karena sejak itulah mulai timbul kewajiban dan hak dari pelaku usaha dan konsumen. Tertuang pula dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai saat pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat menampilkan iklan ataupun promosi dalam bentuk brosur, janji yang dipaparkan berlaku sebagai undang undang dan bersifat mengikat (Brahmanta dan Utari, 2016). Maka pada saat biro perjalanan mencantumkan atau menuliskan berbagai penawaran baik di iklan maupun di pamflet dan brosur saat itu juga segala yang tertuang menjadi sebuah kewajiban yang mengikat bagi biro perjalanan umrah.

Hubungan antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah adalah berupa akad Pemberangkatan umrah yang mana memunculkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Akad umrah merupakan suatu perjanjian yaitu satu pihak mengikatkan diri pada pihak lain, pihak satu membayarkan sejumlah

uang dan pihak lain memberikan pelayanan yakni pemberangkatan umrah (Husni, 2018). Perjanjian demikian ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Akad atau perjanjian umrah ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang diatur dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum (Korayan dan Djayaputra, 2018). Perjanjian umrah memperjanjikan untuk berbuat sesuatu.

Akad umrah yang dilakukan oleh calon jemaah umrah dengan biro perjalanan umrah mengandung hubungan hukum dari perjanjian timbal balik, yaitu calon jemaah memperjanjikan untuk membayar biaya sejumlah yang ditentukan serta biro perjalanan umrah yang harus memenuhi prestasinya sesuai dengan yang dituangkan yakni memberi pelayanan berupa pemberangkatan umrah. Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi, jika perjanjian tertulis tersebut disangkal/tak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi. Perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi, serta mempunyai kepastian hukum untuk mengajukan suatu tuntutan di depan pengadilan. Kekuatan hukum perjanjian tertulis yang dibuat atau ditandatangani oleh para pihak dinyatakan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian yang sudah dibuat, atau ditandatangani oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan wajib dilaksanakan menggunakan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor kekhilafan, paksaan atau penipuan dapat membatalkan perjanjian, pihak yang dirugikan dapat memberikan bukti adanya hal tersebut. Kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak juga dapat dinyatakan batal jika perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bentuk perjanjian antara biro perjalanan umrah dengan jemaahnya dalam hal ini termasuk dalam perjanjian untuk melakukan

pekerjaan menurut Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian untuk melakukan beberapa jasa pelayanan. Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan wisata umrah dengan jemaah dibuat atau berdasarkan kepercayaan pada perusahaan perjalanan umrah, sejak pemberangkatan hingga jemaah kembali ke Indonesia. Pada umumnya suatu perjanjian dibuat apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan dibuktikan secara tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis disebut juga perjanjian bentuk, tujuan perjanjian ini adalah untuk memberikan bukti terhadap hal yang telah disepakati. Kesepakatan lisan terjadi apabila ada kesepakatan (konsensus) dari kedua belah pihak mengenai pokok kesepakatan yang disepakati, sejak saat itu kesepakatan yang dicapai antara para pihak mengikat dan mempunyai akibat yuridis.

Perjanjian mengandung unsur perbuatan hukum yang para pihaknya wajib untuk saling memenuhi prestasinya, baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu, jika tidak maka salah satu atau semua pihak akan dirugikan. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya dalam hukum perdata dikatakan sebagai wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak lain dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang tidak memenuhi prestasinya atas kesengajaan atau kelalaiannya. Ganti rugi atas wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Unsur-unsur wanprestasi adalah terdapat perjanjian antara para pihak, terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi, dan tidak terlaksananya prestasi karena kelalaian atau kesengajaan oleh pihak.

Pertanggungjawaban oleh biro perjalanan umrah selaku pelaku usaha kepada calon jemaah umrah selaku konsumen usaha diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pertanggungjawaban timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi yang sudah diperjanjikan (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Unsur terdapat perjanjian antara para pihak terpenuhi yaitu adanya perjanjian antara calon jemaah umrah dengan biro perjalanan. Kemudian unsur terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasinya juga terpenuhi, yaitu biro perjalanan umrah yang tidak dapat memberangkatkan calon jemaah umrah sesuai

dengan yang diperjanjikan. Unsur kesengajaan dalam kasus kegagalan keberangkatan akibat pandemi tidak terpenuhi. Pihak biro perjalanan umrah tidak dapat memenuhi prestasinya bukan karena sengaja atau lalai maka pihak tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi. Hal ini dituangkan dalam pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan biaya rugi dan bunga dapat dikesampingkan apabila keadaan memaksa atau suatu kejadian tak disengaja.

Tanggung jawab hukum merupakan kewajiban untuk menanggung suatu akibat menurut hukum yang berlaku. Tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang mengenai perbuatan yang dilakukan terkait moral atau etika berbuat suatu. Pelaku usaha mempunyai kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi hal yang boleh dituntut dan diperkarakan. Hukum perdata membagi dasar pertanggungjawaban menjadi dua, yaitu berdasarkan kesalahan dan risiko.

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan disebut *liability based on fault*, yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan yang dibebankan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum akibat kekeliruan atau kelalaian. Hal tersebut dapat terjadi akibat subjek hukum kurang hati-hati, lengah, lupa atau tidak melaksanakan kewajibannya. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan disebut *liability without fault* atau dikenal dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tanggung jawab risiko. Risiko berujung pada suatu keadaan diluar kesalahan pihak yang terikat perjanjian atau sebagai dampak dari keadaan memaksa atau *overmacht* (Rasuh, 2016). *Product liability* adalah suatu keadaan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa. Risiko merupakan kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian atau keadaan di luar kesalahan para pihak.

Risiko dalam industri jasa perjalanan yang mungkin terjadi adalah kecelakaan, *mismanagement*, dan lainnya. Salah satu asas kontrak adalah kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Akibat tidak dituangkannya perjanjian secara tertulis dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen apabila perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya tidak diindahkan. Konsumen mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi karena tidak ada kesepakatan yang menjadi dasar gugatan.

Hak dan kewajiban para pihak yang tidak dilakukan dengan benar dan tidak ada bukti yang dapat diverifikasi untuk menyelidiki maka akan merugikan konsumen. Batasan tanggung jawab perusahaan jasa perjalanan umrah atas prestasi yang terjadi karena tidak adanya dokumen perjanjian, sangat rawan terjadi permasalahan atau pelanggaran seperti wanprestasi atau penipuan, khususnya kegiatan ibadah umrah tanpa adanya kesepakatan tertulis antara para pihak sebagai bukti jika terjadi perselisihan di masa depan. Aturan yang menegaskan kewajiban bentuk perjanjian pemberangkatan umrah antara calon jemaah dan biro perjalanan umrah sangat penting dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis merupakan bentuk kepastian hukum terhadap pemberangkatan umrah dan dapat meminimalisir risiko terhadap tidak terpenuhinya hak dari jemaah umrah.

Kepastian adalah suatu ketetapan atau ketentuan. Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil, kepastian menjadi pedoman perilaku dan keadilan karena pedoman perilaku harus mendukung suatu keharusan agar dianggap wajar. Penegakan hukum secara adil dan andal dapat memenuhi fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif dan bukan secara sosiologis. Kepastian hukum pada tataran normatif adalah ketika suatu peraturan ditetapkan dan diundangkan secara pasti karena peraturan tersebut jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak perlu dipertanyakan (banyak tafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi suatu sistem aturan dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga fitur praktis dari hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk (Nugroho, 2020). Kepastian hukum mengacu pada pelaksanaan hukum yang jelas, tetap,

konsekuen dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif.

Kepastian hukum memberikan kepastian mengenai pengaturan bentuk perjanjian pemberangkatan umrah secara tertulis, adalah untuk memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan. Kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan hak dan kewajibannya menurut hukum. Bentham menyebutkan bahwa *The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri. Tujuan hukum menurut Bentham adalah untuk mendatangkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (Arifianto dkk, 2015). Oleh karena itu, konsep menempatkan kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum. Ukuran yang dapat terlihat adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Penilaian benar atau salah, adil atau tidak ini sangat tergantung pada kebahagiaan yang dirasakan, kemanfaatan didefinisikan sebagai kebahagiaan. Peraturan yang jelas mengenai bentuk perjanjian pemberangkatan umrah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perlindungan dan pemenuhan hak calon jemaah umrah serta dapat meminimalisasi adanya kasus penipuan oleh biro karena Jemaah umrah mempunyai bukti otentik yakni perjanjian tertulis yang telah jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

SIMPULAN

Hukum positif saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan antara biro dengan calon jemaah membuat perjanjian tertulis, maka kebanyakan biro hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dengan calon jemaah. Penegakan perjanjian lisan sangatlah sulit apalagi perjanjian umrah ini merupakan ibadah sehingga memengaruhi animo masyarakat untuk melaporkan atau membuat pengaduan. Perjanjian tertulis penting dibuat dengan tujuan agar proses kerjasama antara biro dengan jemaah umrah dapat berjalan dengan lancar selain itu untuk mengurangi risiko adanya penipuan atau hal apapun yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Perjanjian tertulis maka fungsi dari perjanjian tertulis ini sebagai pedoman bagi biro maupun jemaah untuk bertindak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan peraturan

yang telah ditentukan. Upaya melindungi hak dari calon jemaah harus ada tercantum poin poin atau klausula tertentu dalam perjanjian tertulis yang dibuat antara calon jemaah dengan biro.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanz, A. R. (2015). *Pelaksanaan Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus di PT. Fazary Wisata*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Yogyakarta:Program Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Arifyanto, M. N. (2016). *Anotasi Pemikiran Hukum: Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Malang:Universitas Brawijaya Press.
- Brahmanta, D. G. A. Y., & Utari, A. A. S. (2016). Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 04(02). 1-5.
- Dani, A. A. (2018). Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 23-45.
- Fauzi, E. (2019). Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Calon Jemaah Panitia Penyelenggara Ibadah Umroh. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 77-92.
- Hidayat, W., & Saron, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Notarius*, 15(1), 283-295.
- Husni, R. M. (2018). Perlindungan Hukum Calon Jemaah Umrah Sebagai Kreditor Dalam Kepailitan Biro Perjalanan Umrah. *Jurisdiction*, 1(1), 323-342.
- Istiawati, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Wanprestasi Perjalanan Umroh. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6(1), 47-57.
- Korayan, J., & Djayaputra, G. (2018). Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jemaahnya. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-32.
- Kusumah, W. F., & Januarita, R. (2018). Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Ibadah Umrah yang Dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-asas Hukum Perjanjian. *Prosiding Ilmu Hukum*, 4(1), 75-80.
- Maharani, D. (2020). *Analisis Tanggung Jawab Manajemen Travel Haji Dan Umrah Terhadap Calon Jemaah Menurut Akad Ijārah Bi Al 'Amal*. Disertasi (tidak dipublikasikan). Aceh:UIN Ar-Raniry.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1), 12-30.
- Nugroho, Y. Y. (2020) *Kepastian Hukum Penjualan Harta Kekayaan Dalam Kepemilikan Harta Benda Berdasarkan Putusan Pengadilan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir Teknis Substantif Balai Harta Peninggalan dan Pendaftaran Kurator*. Depok:BPSDM KUMHAM Press.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2). 173-180.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338.
- Rusli, T. (2012). Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Pranata Hukum*, 7(1). 79-88.
- Ruswandana, N. V. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. *Law Journal*, 5(13). 1-12.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta:Penerbit Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Soeroso R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- Trisnawati, W. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Keberangkatan Ibadah Umroh Antara Calon Jemaah Umroh dengan PT. Hijrah Haramain di Kota Medan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 6(1). 1-13.